

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, N. F., Garancang, S., & Abunawas, K. (2023). Konsep umum populasi dan sampel dalam penelitian. *Jurnal Pilar*, 14(1), 15–31.
- Badan Standardisasi Nasional. (2004). *SNI 03-6981-2004: Tata cara perencanaan lingkungan perumahan sederhana tidak bersusun di daerah perkotaan*. Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.
- Bayuprima, I., Sutarja, & Yansen, I. (2016). Pengaruh Ketersediaan Fasilitas Umum Terhadap Harga Jual Perumahan di Kawasan Mangapura. *Jurnal Spektran*, 4(2), 9-17. DOI: 10.24843/SPEKTRAN.2016.v04.i02.p02
- Blaang, C. (1986). *Perumahan dan Permukiman Sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadilla, F., Yudhana, G. and Rini, E.F., 2017. Faktor yang Mempengaruhi Preferensi Bermukim Penghuni Perumahan Formal Kota Surakarta Studi Kasus Kelurahan Mojosongo. *ARSITEKTURA*, 15(1), pp.50- 58.
- Febrianto, R. S., Susilo, G. A., & Arafah, F. (2022). Kajian Fasilitas Sosial Pada Perumahan Komersial (Studi Kasus: Perumahan PP di Kota Malang). *Pawon: Jurnal Arsitektur*, 6(1), 85-94.
- Guntara. 2015. “Pengertian Analisis Spasial Dalam Sistem Informasi Geografi.” Retrieved (<https://www.guntara.com/2015/01/analisis-spasial-ialah-suatu-teknik.html>).
- Hamlih Badillah. (2023). Wawancara mengenai penyerahan PSU oleh pengembang perumahan. *Nomor Satu Kaltim*. Diakses dari [Nomor Satu Kaltim](#).
- Irawan, F., & Pratiwi, A. S. (2017). *Addressing infrastructure financing gap in Indonesia: Role of financial sector*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Retrieved from <https://fiskal.kemenkeu.go.id/files/beritakajian/file/AddressingInfrastructure.pdf>
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2009). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman di Daerah.

- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 2022. Buku Panduan FGD Tindak Lanjut Pembahasan Standarisasi Rencana Tapak (*Site plan*) Perumahan. Jakarta.
- Lollyanti, V., Normelani, E., & Adyatma, S. (2017). Faktor Penyebab Pengembang Memilih Lokasi Perumahan di Kecamatan Sungai Tabuk Kabupaten Banjar. *Jurnal Pendidikan Geografi*, 4(1), 19-26. DOI: 10.20527/jpg.v4i1.3025
- Longmont Public House. (2024, June 27). *Perumahan komersil: Pengertian, jenis, perbedaan, fasilitasnya*. Longmont Public House. <https://www.longmontpublichouse.com/2024/06/27/perumahan-komersil-pengertian-jenis-perbedaan-fasilitasnya/>
- Marliani, L. (2020). EVALUASI PROGRAM KOTA TANPA KUMUH OLEH DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN CIAMIS. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 7(1), 48-67.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Nurpita, A., & Wardhani, A. W. (2021). *Analisis Trend Pertumbuhan Indeks Harga Properti Komersial di Kota Besar Indonesia Pasca Pandemi Covid-19*. *Jurnal Manajemen Aset dan Penilaian*, 1(1), 17–22.
- Ozer, S., & Jacoby, S. (2022). The design of subsidized housing: towards an interdisciplinary and cross-national research agenda. *Housing Studies*. <https://doi.org/10.1080/02673037.2022.2045005>.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2013). *Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas pada Kawasan Perumahan*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2013). *Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan kepada Pemerintah Daerah*.
- Pemerintah Kota Balikpapan. (2014). *Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan PSU Perumahan kepada Pemerintah Kota Balikpapan*.

- Pemerintah Kota Balikpapan. (2018). *Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyerahan dan Pengelolaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan dan Permukiman*. Balikpapan: Pemerintah Kota Balikpapan.
- Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Bantuan PSU Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Peraturan PUPR tentang penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) Nomor: 242/KPTS/M/2020.
- Prahasta, Eddy. 2009. *Sistem Informasi Geografis Konsep-Konsep Dasar (Perspektif Geodesi & Geomatika)*. Bandung: Informatika.
- Pratama, A. R. (2013). Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyerahan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) Perumahan di Kota Tangerang Selatan. Universitas Indonesia.
- Pratama, A.R., & Riduansyah, M. (2013). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan di Kota Tangerang Selatan. Universitas Indonesia.
- Rizki, A. P. (2013). Faktor-faktor penghambat pelaksanaan penyerahan prasarana sarana dan utilitas perumahan di Kota Tangerang Selatan. Jakarta: FISIP UI
- Sadana. 2014. Perencanaan kawasan pemukiman. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sari, D. P., & Roychansyah, M. S. (2014). Konsep Smart Growth, Compact City dan “Retrofiiting” sebagai Solusi Urban Sprawl di Kota-kota Besar di Indonesia. *Jurnal Arsitektur dan Desain*, 1(1), 7.
- Sugandhi, B., et al. (2013). Mekanisme penyerahan PSU perumahan dari pengembang kepada pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota*, 2(3).
- Sugiyono, P. D. (2017). Metode penelitian bisnis: pendekatan kuantitatif, kualitatif, kombinasi, dan R&D. *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 225(87), 48-61.
- Sugiyono, P. D. (2019). metode penelitian pendidikan (kuantitatif, kualitatif, kombinasi, R&D dan penelitian pendidikan). *Metode Penelitian Pendidikan*, 67.
- Supriyadi, S., Qomariyah, S., & Muttaqin, A. Y. (2013). Perencanaan *Site plan* Dan Studi Kelayakan Investasi Pada Perumahan Pondok Permata Hijau Desa Wirun Kecamatan Mojolaban. *Matriks Teknik Sipil*, 1(2).

- Suryani, A. (2012). Tantangan implementasi konsep eco-settlement tentang perumahan dan kawasan permukiman dalam UU no 1/2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman. *J. Aspir*, 2(1), 1-16.
- Sutanto, D. H. (2021). KEBIJAKAN DAN IMPLEMENTASI PENYERAHAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM PERUMAHAN DI KABUPATEN PAMEKASAN. *Journal of Syntax Literate*, 6.
- Syah, M. R. (2014). Ekonomi politik penyerahan fasum dan fasos oleh pengembang perumahan kepada pemerintah Kota Surabaya.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Utary, D., Doloksaribu, E., & Nababan, E. (2020). Pendampingan Pemetaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) Perumahan Berbasis SIG di Kabupaten Magetan. *Reswara: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(2), 1-8.
- Vitriana, A. (2019). The Difficulties in the Handover of Housing Infrastructure, Facility, and Utility in the Greater Bandung Area. *Jurnal Bina Praja*, 11(2), 149–157. <https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.149-157>
- Wibowo, K. M., Kanedi, I., & Jumadi, J. (2015). Sistem Informasi Geografis (SIG) Menentukan Lokasi Pertambangan Batu Bara di Provinsi Bengkulu Berbasis Website.
- Yin, R. K. (2018). *Case Study Research and Applications: Design and Methods* (6th ed.). SAGE Publications.